



TPS Rawan Politik Uang Diwaspadai

● YULIANINGSIH

Hanya ada tiga TPS yang masuk kategori aman.

YOGYAKARTA — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta mewaspadai beberapa wilayah yang diindikasikan rawan adanya politik uang atau politik transaksional menjelang Pilkada Kota Yogyakarta, Rabu (15/2) mendatang. Wilayah rawan politik transaksional ini diindikasikan ada di wilayah pinggiran dan bantaran sungai di Kota Yogyakarta.

"Kami sudah petakan daerah rawan politik transaksional ini. Sedikitnya ada 50 tempat pemungutan suara (TPS-red) yang rawan politik ini," ujar Anggota Panwaslu Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Iwan Ferdian, di sela-sela pantauan distribusi logistik Pilkada di Gudang KPU setempat, Senin (13/2).

Menurut Iwan, pada masa tenang seperti saat ini kerawanan politik transaksional tersebut sangat tinggi. Beberapa modus politik transaksional yang diwaspadai antara lain undangan pertemuan, kumpulan warga, atau mobilisasi warga. "Berdasarkan pengalaman di wilayah-wilayah yang

cenderung banyak masyarakat dengan tingkat kesejahteraan kurang akan cenderung membuka diri pada politik transaksional ini," katanya.

Panwaslu, kata dia, telah membekali pengawas TPS untuk melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap kemungkinan kecurangan pada pelaksanaan Pilkada tersebut. "Tugas pengawas di TPS nanti akan terus berkeliling memantau dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul," katanya.

Sementara itu Kapolresta Kota Yogyakarta, Kombes Tommy Wibisono mengatakan, pihaknya akan menempatkan satu personel kepolisian di TPS yang diindikasikan rawan terjadinya konflik. Dari 794 TPS pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017, pihaknya mengidentifikasi hanya ada tiga TPS yang masuk kategori aman. Sedangkan sisanya masuk kategori TPS rawan 1 dan TPS rawan 2.

"Untuk TPS yang masuk kategori aman kami tempatkan dua personel polisi untuk mobile di 3 TPS ini," ujarnya.

TPS yang masuk kategori rawan 1 adalah TPS yang pada Pemilu sebelumnya pernah terjadi gesekan atau muncul indikasi gesekan antar pendukung. Sedangkan TPS yang masuk kategori rawan 2 merupakan TPS yang gesekannya lebih tinggi antar kelompok masyarakat. TPS yang masuk kategori ini diidentifikasi ada 44 tempat. Sisanya masuk kategori ra-

wan 1. "Untuk yang rawan 1 kita tempatkan 1 personil dan rawan 2 bisa lebih ditambah personil tertutup," katanya. Meski demikian, Tommy optimis pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta 2017 akan berjalan lancar dan aman.

Sementara itu, meskipun sudah memasuki hari kedua masa tenang Pilkada Kota Yogyakarta, namun beberapa alat peraga kampanye (APK) masih terpasang di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Beberapa baliho yang masih terpasang antara lain di simpang tiga XT Square Jalan Menteri Supeno. Baliho itu adalah salah satu APK yang difasilitasi oleh KPU Yogyakarta.

Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Iwan Ferdian mengatakan dari hasil koordinasi dengan Satpol PP Yogyakarta kemarin, disepakati penertiban APK Pilkada akan dilakukan Selasa (14/2) pukul 13.00 WIB. Menurutnya kewenangan penertiban APK, termasuk waktu pelaksanaannya menjadi kewenangan Satpol PP. "Besok (Rabu) akan ditertibkan. Serentak di 14 kecamatan," ujarnya.

Menurutnya, APK harus bersih pada masa tenang Pilkada telah disampaikan ke KPU Yogyakarta sebelumnya. Para tim paslon pilkada juga diharapkan dapat menurunkan APK sendiri. Tidak harus menunggu penertiban Satpol PP. Termasuk lima

baliho APK paslon yang difasilitasi KPU karena, lanjutnya, sudah diserahkan ke tim paslon.

Sementara itu, rencana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menertibkan APK itu pada Senin (13/2) batal dilakukan. Menurut Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Yogyakarta Christiana Suhantini, penertiban baru akan dilakukan Selasa (14/2). Pihaknya baru akan berkoordinasi dengan KPU dan Panwas, Polresta, Kodim dan wilayah.

Pihaknya membantah ditundanya penertiban itu berarti Satpol PP melakukan pembiaran. Dia menjelaskan, pada Ahad (12/2), Satpol PP telah mengadakan gelar perkara terkait penertiban APK Pilkada. Penertiban APK itu, lanjutnya, juga tidak perlu menunggu rekomendasi dari KPU setempat karena sudah masuk hari tenang. Namun, masih diperlukan koordinasi lagi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan gesekan.

Dia belum dapat merinci jumlah dan titik APK yang akan ditertibkan karena menunggu hasil koordinasi. Namun dia memastikan semua APK Pilkada akan bersih pada besok Selasa (14/2). "Besok kami akan tertibkan semua APK. Kami tidak membiarkan. Tapi memastikan penertiban sudah terkoordinasi dengan pihak terkait," ujarnya.

■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005